

## **PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DENGAN FEDERASI SERIKAT PEKERJA SEBAGAI KUASA HUKUM (STUDI KASUS DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA NASIONAL KOTA SEMARANG SEBAGAI KUASA HUKUM PEKERJA PT. HOLI KARYA SAKTI)**

Oleh: Raviandra Ichlasul Amal<sup>1</sup>, Nailul Amany<sup>2</sup>

### **INTISARI**

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Federasi Serikat Pekerja (DPC SPN Kota Semarang) dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam kasus antara Pekerja PT. Holi Karya Sakti melawan PT. Holi Karya Sakti. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis legalitas Federasi Serikat Pekerja (DPC SPN Kota Semarang) dalam melaksanakan hak sebagai kuasa hukum pada kasus antara Pekerja PT. Holi Karya Sakti melawan PT. Holi Karya Sakti pada Pengadilan Hubungan Industrial Semarang.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis normatif-empiris. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau biasa juga disebut dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder lalu dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Data yang diperoleh selama penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mendapat jawaban dari permasalahan yang dikemukakan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran DPC SPN Kota Semarang dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagai kuasa hukum telah dimulai sejak perundingan bipartit hingga nantinya ada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam menjalankan peran tersebut DPC SPN Kota Semarang mengalami beberapa kendala. Selanjutnya, Federasi Serikat Pekerja secara yuridis dapat menjadi Kuasa Hukum pada Pengadilan Hubungan Industrial, dalam praktek DPC SPN Kota Semarang dapat menjadi Kuasa Hukum melalui permohonan pendampingan yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Khusus.

**Kata Kunci: Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Federasi Serikat Pekerja, Kuasa Hukum**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Strata-1 (S-1) Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *email*: raviandra.i@mail.ugm.ac.id

<sup>2</sup> Dosen pada Departemen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, *email*: nailul.amany@mail.ugm.ac.id

***SETTLEMENT OF INDUSTRIAL RELATION DISPUTE WITH  
FEDERATION OF LABOUR UNION AS THE LEGAL ATTORNEY  
(CASE STUDY DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA  
NASIONAL KOTA SEMARANG AS THE LEGAL ATTORNEY OF PT.  
HOLI KARYA SAKTI'S WORKERS)***

*By: Raviandra Ichlasul Amal<sup>3</sup>, Nailul Amany<sup>4</sup>*

**ABSTRACT**

*This legal research aims to identify and analyze the role of the Federation of Labour Union (DPC SPN Kota Semarang) in resolving industrial relations dispute between PT. Holi Karya Sakti's workers and PT. Holi Karya Sakti. Another purpose of this legal research is to identify and analyze the legality of Federation of Labour Union (DPC SPN Kota Semarang) executing their rights as legal attorney in a case between PT. Holi Karya Sakti's workers against PT. Holi Karya Sakti at Semarang Industrial Relations Court.*

*The character of this legal research is descriptive with normative-empirical type. Normative research is a legal research conducted by examining various legal materials or secondary data and commonly known as library research. Sociological or empirical legal research is a research that initially examines secondary data then continue with research on primary data by field research or towards the community. Data which is obtained from library and field research is analysed descriptively qualitative to get answers to the problems raised.*

*The results of this research indicate that the role of Federation of Labour Union (DPC SPN Kota Semarang) in the settlement of industrial relations dispute as legal attorney has begun since bipartite negotiation until there is final and binding execution. In carrying out the role as legal attorney, DPC SPN Kota Semarang experienced several obstacles. Furthermore, the Federation of Labour Union can legally become a legal attorney at the Industrial Relations Court, in practice DPC SPN Kota Semarang can become a Legal Attorney through a letter of assistance request which then implemented with power of attorney letter.*

***Keyword: Settlement of Industrial Relations Disputes, Federation of Labour Union, Legal Attorney***

---

<sup>3</sup> Student of Bachelor Degree (S-1) at Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, email: [raviandra.i@mail.ugm.ac.id](mailto:raviandra.i@mail.ugm.ac.id)

<sup>4</sup> Lecturer at Civil Law Department, Faculty of Law Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, email: [nailul.amany@mail.ugm.ac.id](mailto:nailul.amany@mail.ugm.ac.id)